

**FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN
PEMDA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Batik Surakarta

Oleh :

ASRI NURHAMIDAH

NIM : 202303P004

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM BATIK

SURAKARTA

2026

**FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN
PEMDA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Batik Surakarta

Oleh :

ASRI NURHAMIDAH

NIM : 202303P004

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM BATIK

SURAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini setelah membaca skripsi dengan judul:

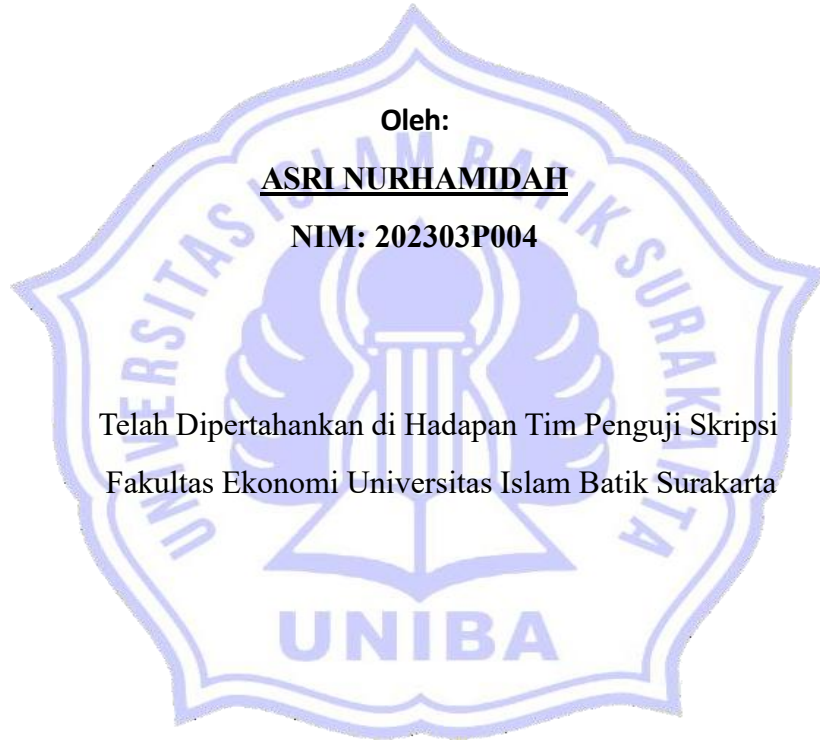
**FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN
PEMDA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Oleh:

ASRI NURHAMIDAH

NIM: 202303P004

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta



Surakarta, 13 Februari 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Yuli Chomsatu S,S.E., M.Si., Ak

Dra. Endang Masitoh, M.Si,Ak,CA

Mengetahui,

Kepala Program Studi Akuntansi

Dimas Ilham Nur Rois, SE., M.Ak

NIDN. 0623119402

HALAMAN PENGESAHAN

Telah diterima dan disahkan untuk memenuhi syarat dan tugas guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta

Pada Hari : Jum'at

Tanggal : 13 Februari 2026

Tim Penguji :

- | | | |
|--|----------|----------|
| 1. Yuli Chomsatu S, S.E.,M.Si., Ak | (|) |
| Ketua | | |
| 2. Dra. Endang Masitoh, M.Si,Ak,CA | (|) |
| Sekretaris | | |
| 3. Anita Wijayanti, S.E, M.M,Akt., CA. Ph.D | (|) |
| Anggota | | |

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Batik Surakarta

Dr. Suhendro, SE, M.Si, Akt
NIDN. 0015027201

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asri Nurhamidah

NIM : 202303P004

Judul Skripsi : Faktor - Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan

Pemda Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali diacu dalam naskah ini secara tertulis dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Surakarta, 13 Februari 2026

Asri Nurhamidah
NIM : 202303P004

MOTTO

“Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra’d: 11)

“Jika kamu bersyukur, maka Aku akan menambah nikmat kepadamu.”

(QS. Ibrahim: 7)

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim)

“Keberhasilan bukan milik orang pintar. Keberhasilan milik mereka yang terus berusaha”.

(B. J. Habibie)

“Tidak ada usaha yang sia-sia dan tidak ada hasil yang cuma-cuma”.

(Penulis)

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala puji Syukur kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Karya ini saya persembahkan kepada :

1. Untuk Ayah dan Ibu tercinta, yang telah menanamkan akar impian dan menyiraminya dengan kasih sayang tanpa batas. Setiap huruf dalam skripsi ini adalah bukti nyata dari doa-doa kalian yang tak pernah putus. Terima kasih telah menjadi pelita dalam gelapnya perjuangan ini
2. Kepada Suamiku Fahrudin Alwi, yang selalu percaya bahwa saya bisa. Terima kasih telah menjadi penyemangat di kala lelah dan pelipur lara di saat putus asa. Kehadiranmu membuat perjalanan skripsi ini menjadi lebih bermakna
3. Untuk Buah Hatiku Muhammad Faqih Manarul Hikam, Terima kasih telah menjadi alasan untuk terus berjuang dan menginspirasi.
4. Teman-teman kerja di Sub Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri, Terimakasih selalu memberikan motivasi dan arahan dalam penyelesaian skripsi.
5. Teman-teman Prodi Akuntansi kelas Malam Universitas Islam Batik Surakarta yang dapat saling memotivasi dalam penyelesaian skripsi.

Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terimakasih atas doa, semangat, motivasi dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'aalamiin, puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, Rahmat, ridho, rizki dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta.

Selama studi dan dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh Karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Ipmawan Muhammad Iqbal, S.Ag., M.Ag selaku rector Universitas Islam Batik Surakarta
2. Bapak Dr. Suhendro, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta
3. Bapak Dimas Ilham Nur Rois, S.E, M.Si., Ak selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Islam Batik Surakarta dan Dosen Pembimbing Akademik.
4. Ibu Yuli Chomsatu S, S.E, M.Si., Ak selaku dosen pembimbing 1 yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Endang Masitoh, M.Si, Akt, CA selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta yang telah memberikan ilmu serta bimbingan kepada penulis.
7. Bapak Ibu staff dan karyawan Universitas Islam Batik Surakarta yang telah membantu penulis dalam hal administrasi

8. Kedua Orang tua, suami serta anakku tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
9. Teman-temanku di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri yang telah memberikan semangat dan motivasi.
10. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi pembaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Bagi Akademisi.....	7
2. Bagi Praktisi	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori	8
1. Teori Agensi	8
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	8
3. Belanja Modal (X1).....	10
4. Pendapatan Asli Daerah (X2)	11
5. Dana Perimbangan (X3).....	12
B. Penelitian Terdahulu	13
C. Kerangka Penelitian	15
D. Hipotesis	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	19
A. Jenis Penelitian	19
B. Variabel Penelitian dan Pengukurannya	19
1. Variabel Dependen	19
2. Variabel Independen	20
C. Sumber Data dan Responden.....	23
1. Sumber Data	23
2. Responden	23
D. Populasi dan Sampel	24
E. Instrumen Penelitian.....	24
F. Metode dan Analisis Data	24

1. Analisis Statistik Deskriptif	24
2. Uji Asumsi Klasik.....	25
3. Analisis Regresi Linier Berganda	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Deskripsi Umum Data Penelitian	31
B. Deskripsi Data Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.....	33
C. Analisis Data	34
1. Uji Statistik Deskriptif.....	34
2. Uji Asumsi Klasik.....	35
3. Uji Regresi Linier Berganda	39
D. Pembahasan	43
BAB V PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Keterbatasan Penelitian	47
C. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Pengambilan Data Penelitian	31
Tabel 4.2	Data Sampel Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	32
Tabel 4.3	Hasil Uji Statistik Deskriptif	34
Tabel 4.4	Hasil Uji Normalitas.....	35
Tabel 4.5	Hasil Uji Multikolinearitas.....	36
Tabel 4.6	Hasil Uji Heteroskedastisitas	37
Tabel 4.7	Hasil Uji Autokorelasi.....	38
Tabel 4.8	Hasil Uji Model Regresi.....	39
Tabel 4.9	Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F).....	40
Tabel 4.10	Hasil Uji Hipotesis (Uji t)	41
Tabel 4.11	Hasil Uji Koefisien Determinasi	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rasio Realisasi PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah (persen), 2022 Sumber : BPS, (2024).....	3
Gambar 1.2 Rasio Realisasi PAD terhadap Total Pendapaten Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah (persen), 2023 Sumber : BPS, (2024).....	4
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian	15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Pemilihan Sampel	53
Lampiran 2. Data Sampel Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.....	54
Lampiran 3. Hasil Tabulasi Data.....	55
Lampiran 4. Data Penelitian Tahun 2021-2024	63
Lampiran 5. Data Outlier	66
Lampiran 6. Data Penelitian Setelah Outlier Tahun 2021-2024	67
Lampiran 7. Hasil Uji Statistik Deskriptif	71
Lampiran 8. Hasil Uji Normalitas.....	72
Lampiran 9. Hasil Uji Multikolinearitas	73
Lampiran 10. Hasil Uji Heterokedastisitas	74
Lampiran 11. Hasil Uji Autokorelasi	75
Lampiran 12. Hasil Uji Model Regresi.....	76
Lampiran 13. Hasil Uji F	77
Lampiran 14. Hasil Uji T	78
Lampiran 15. Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	79

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Daerah pada periode tahun 2021 hingga 2024. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode sampling jenuh. Dari 140 data yang terkumpul, ditemukan ada 6 *outlier* sehingga menghasilkan 134 sampel untuk dapat dianalisis menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (H2) dan Dana Perimbangan (H3) menunjukkan adanya pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan belanja modal (H1) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini merefleksikan adanya kewajaran dalam struktur pengelolaan keuangan daerah, di mana ketergantungan terhadap transfer dana pusat belum mampu mendorong kinerja fiskal secara optimal. Sebaliknya, penguatan kapasitas Pendapatan Asli Daerah terbukti menjadi determinan positif terhadap kinerja keuangan, menekankan pentingnya otonomi fiskal dalam rangka desentralisasi. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara instrumen fiskal dan efektivitas kinerja sektor keuangan publik di tingkat subnasional.

Kata Kunci : Faktor-faktor, Kinerja Keuangan, Pemerintah Daerah,

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of Capital Expenditure, Locally-Owned Revenue (PAD), and Balancing Funds on the Financial Performance of Regional Governments from 2021 to 2024. The population used in this study was 35 Regency/City Governments in Central Java. This study used a quantitative approach with a saturated sampling method. Of the 140 data collected, 6 outliers were found, resulting in 134 samples for analysis using a multiple linear regression model. The results of this study indicate that Locally-Owned Revenue (H2) and Balancing Funds (H3) have an influence on local government financial performance. Meanwhile, capital expenditure (H1) has no effect on local government financial performance. This finding reflects the reasonableness of the regional financial management structure, where dependence on central fund transfers has not been able to drive optimal fiscal performance. Conversely, strengthening the capacity of Locally-Owned Revenue has been proven to be a positive determinant of financial performance, emphasizing the importance of fiscal autonomy within the framework of decentralization. Theoretically, this study enriches the literature on the relationship between fiscal instruments and the effectiveness of public financial sector performance at the subnational level.

Keywords : Factors, Financial Performance, Local Governmen

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia telah menerapkan sistem otonomi daerah. Tujuan sistem ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan, Dimana Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan dengan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban dengan tujuan untuk mengatur dan menjalankan masing-masing pemerintahan sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kinerja keuangan pemerintah daerah, terutama dalam aspek kemandirian fiskal menjadi salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kesehatan keuangan pemerintah daerah. Kemandirian fiskal mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah secara mandiri tanpa bergantung terhadap pemerintah pusat.

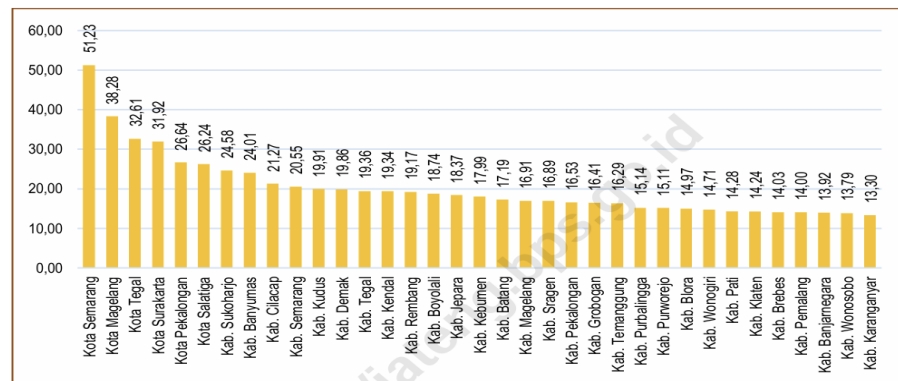
Perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah atau desentralisasi fiskal. Semakin tinggi rasio PAD terhadap total pendapatan maka Tingkat kemandirian suatu daerah semakin tinggi dan Tingkat

desentralisasi fiskal semakin baik. Hal itu menunjukkan bahwa belanja daerah di wilayah tersebut lebih banyak didanai dari Pendapatan Asli Daerahnya.

Rasio PAD Provinsi Jawa Tengah terhadap total pendapatan pada tahun 2022 adalah 67,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah telah cukup mandiri dalam membiayai belanja daerahnya dengan menggunakan pendapatan asli daerahnya sendiri. Pada tahun 2023, rasio PAD ini meningkat menjadi 68,38 persen. Dengan demikian, kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki kemampuan yang semakin tinggi dalam menyelenggarakan desentralisasi. Tingkat desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dan 2023 masuk dalam kriteria sangat baik karena nilainya di atas 50 persen. (Widiatmika, 2024)

Pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, rasio PAD pada tahun 2022 berkisar antara 13,30 sampai dengan 51,23 persen. Sedangkan pada tahun 2023, rentang rasio PAD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menjadi lebih lebar menjadi 10,47 sampai dengan 59,35 persen. Kota Semarang sebagai pusat perekonomian Jawa Tengah merupakan kota yang memiliki rasio PAD tertinggi baik pada tahun 2022 maupun 2023. Selisih rasio PAD tahun 2022 dan 2023 antara Kota Semarang sebagai urutan pertama di Provinsi Jawa Tengah dengan urutan kedua pun cukup jauh. (Widiatmika, 2024)

Fenomena tersebut terlihat pada grafik Rasio realisasi PAD terhadap Total pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah pada tahun 2022 berikut :

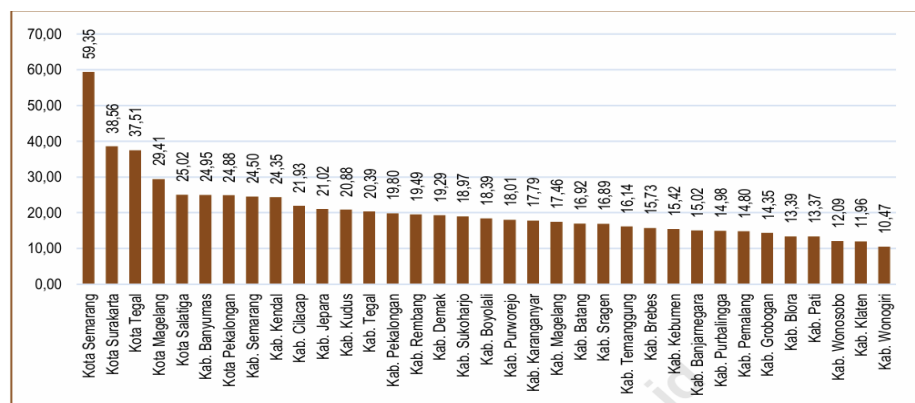


Gambar 1.1 Rasio Realisasi PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah (persen), 2022
Sumber : BPS, (2024)

Pada Gambar 1.1 diatas menunjukkan perbandingan Rasio PAD terhadap total pendapatan dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah pada Tahun 2022. Kota Semarang menjadi satu-satunya pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masuk dalam kriteria tingkat desentralisasi fiskal sangat baik. Kemudian diikuti oleh Pemerintah Kota Magelang (38,28 persen), Kota Tegal (32,61 persen), dan Kota Surakarta (31,92 persen) yang termasuk tingkat desentralisasi fiskal cukup. Selanjutnya Kota Pekalongan (26,64 persen), Kota Salatiga (26,24 persen), Kabupaten Sukoharjo (24,58 persen), Kabupaten Banyumas (24,01 persen), Kabupaten Cilacap (21,27 persen), dan Kabupaten Semarang (20,55 persen) masuk dalam kategori tingkat desentralisasi fiskal sedang. Sementara itu, 25

pemerintah kabupaten/kota lainnya masuk dalam kriteria desentralisasi fiskal kurang.

Sedangkan pada anggaran tahun 2023, rasio PAD terhadap total pendapatan pemerintah kabupaten/kota se Jawa Tengah ditunjukkan pada Gambar 1.2 Kota Semarang masih menjadi satu-satunya pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masuk dalam kriteria tingkat desentralisasi fiskal sangat baik yaitu 59,35 persen. Selanjutnya diikuti oleh Pemerintah Kota Surakarta (38,56 persen) dan Kota Tegal (37,51 persen) yang termasuk tingkat desentralisasi fiskal cukup. Kemudian terdapat 10 pemerintah kabupaten/kota masuk dalam kategori tingkat desentralisasi fiskal sedang dan 22 pemerintah kabupaten/kota lainnya masuk dalam kriteria desentralisasi fiskal kurang, hal tersebut dapat dilihat dari grafik di bawah ini :



**Gambar 1.2 Rasio Realisasi PAD terhadap Total Pendapaten
Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah (persen), 2023**
Sumber : BPS, (2024)

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fadilah & Andriani, (2025);Pranita *et al.*, (2024); Novita & Arza, (2024) menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Apriani *et al.*, (2024) dan Padang & Padang, (2023). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pratama *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Selain Pendapatan Asli Daerah, pada penelitian terdahulu ditemukan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah diantaranya adalah Belanja Modal dan Dana Perimbangan. Peneliti menemukan adanya *gap riset* pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwi Apriani *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Fadilah & Andriani, (2025) ; Novita & Arza, (2024) dan Zamzami & Rakhman, (2023) menunjukkan hasil bahwa belanja modal mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sedangkan penelitian sebelumnya terkait dana perimbangan yang dilakukan oleh Fadilah & Andriani, (2025) menunjukkan hasil bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah. Hasil yang berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Pranita *et al.*, (2024) dan Novita & Arza, (2024) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan kinerja keuangan.

Berdasarkan fenomena dan *gap riset* di atas, penulis bertujuan untuk melanjutkan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan judul **“Faktor – Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi -Jawa Tengah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti terkait Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah serta membuka peluang untuk mempelajari tentang factor-faktor yang berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, serta sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan daerah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Agensi (*Agency theory*). Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan agensi adalah kontrak kerja antara pihak pemberi tugas dan penerima tugas, di mana agen diberi wewenang untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal.

Hubungan teori keagenan dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah dimana prinsipal yaitu Pemerintah Pusat yang bertindak sebagai pemberi perintah dan bertugas untuk mengawasi, memberikan penilaian serta masukan atas tugas yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Daerah yang bertindak sebagai agen untuk mengelola sumber daya. Pemerintah Daerah (agen) diberi wewenang untuk mengelola keuangan, namun berpotensi memprioritaskan kepentingan sendiri. Sehingga diperlukan pengawasan, akuntabilitas dan kinerja keuangan yang baik, khususnya untuk peningkatan kemandirian keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan dana dari Pemerintah Pusat. Jika kinerja keuangan Pemerintah Daerah dikelola dengan baik, maka kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya juga akan tercukupi dan tidak sepenuhnya bergantung kepada Pemerintah Pusat. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah (Kemandirian Pemerintah Daerah)

dapat diukur dari kemampuan membiayai kegiatan pemerintahan secara mandiri tanpa bergantung dari pusat, yang tercermin dari Rasio PAD yang tinggi, ketergantungan dana perimbangan yang rendah dan alokasi belanja modal untuk infrastruktur.

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan laporan kinerja keuangan adalah laporan yang menggambarkan kinerja keuangan entitas (Pemerintah Daerah) dalam satu periode akuntansi. Kinerja dalam hal ini digambarkan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menciptakan surplus. Laporan Kinerja Keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit.

Menurut Mardiasmo (2018), kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara mandiri, termasuk bagaimana anggaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, kinerja keuangan adalah pencapaian hasil dari

pelaksanaan anggaran yang tercermin dalam efektivitas realisasi pendapatan, efisiensi belanja, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kemandirian Daerah yang ideal adalah ketika Pendapatan Asli Daerah meningkat secara signifikan untuk dapat membiayai belanja modal tanpa mengandalkan dana transfer dari Pemerintah Pusat.

3. Belanja Modal (X1)

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau Pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan serta aset tetap lainnya. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang

memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset.

Belanja modal diklasifikasikan atas beberapa jenis, diantaranya belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja Gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan serta belanja asset tetap lainnya.

4. Pendapatan Asli Daerah (X2)

Di dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bagian dari Pendapatan daerah yang berasal dari potensi ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undsgan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.

5. Dana Perimbangan (X3)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan memiliki fungsi yang signifikan, karena dana perimbangan merupakan Solusi untuk menutup celah fiskal antara belanja daerah dengan PAD di daerah tersebut.

Dana Perimbangan yang digelontorkan oleh pusat kepada daerah terdiri dari 3 jenis yaitu :

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan instrument utama dalam sistem transfer fiskal untuk menjamin terjadinya pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, sehingga daerah dengan kapasitas fiskal rendah tetap dapat menjalankan fungsi pelayanan public secara optimal.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. DAK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non fisik.

c. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang berasal dari pendapatan negara yang dibagikan kepada daerah berdasarkan presentase tertentu, terutama dari penerimaan pajak dan sumber daya alam. DBH bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

B. Penelitian Terdahulu

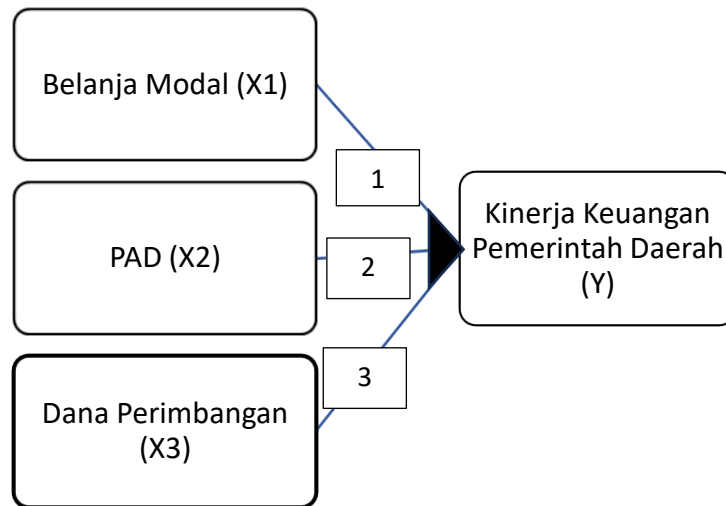
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadilah & Andriani (2025) dan Sundari & Pramesti (2025) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal itu sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novita & Arza, (2024) ; Ramadana *et al.*, (2023) dan Zamzami & Rakhman, (2023). Sedangkan

dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Apriani *et al.*, (2024) ; Lestari, (2024) dan Pratama *et al.*, (2024) menunjukkan hasil bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadilah & Andriani (2025); Andes Pranita, (2024) ; Dwi Apriani *et al.*, (2024) ; dan Novita & Arza, (2024) yang menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Padang & Padang, (2023). Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Temuan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadilah & Andriani, (2025) memberikan hasil bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah. Hasil yang berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Andes Pranita, (2024) dan Novita & Arza, (2024) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Padang & Padang, (2023).

C. Kerangka Penelitian



Gambar 2.3 Kerangka konseptual penelitian

Keterangan :

1. Fadilah & Andriani (2025) ; Masdar *et al.*, (2025) Sundari & Pramesti (2025) ;Novita & Arza (2024);Teresa Ona Delang, (2024); Fitri *et al.*, (2024) ;Ramadana *et al.*, (2023) ; Zamzami & Rakhman (2023)
2. Fadilah & Andriani (2025) ; Paulina & Supadmi, (2025) ;Pranita *et al.*, (2024) ; Dwi Apriani *et al.*, (2024); Novita & Arza (2024) ; Padang & Padang (2023)
3. Paulina & Supadmi, (2025); Andes Pranita (2024) ; Novita & Arza (2024) ; Padang & Padang (2023)

D. Hipotesis

1. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja Modal pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung memiliki peranan dalam memicu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Belanja modal bersifat tidak rutin dan memiliki manfaat jangka panjang.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwi Apriani *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Fadilah & Andriani (2025) ; Masdar *et al.*, (2025) Sundari & Pramesti (2025) ;Novita & Arza (2024) ;Teresa Ona Delang, (2024); Fitri *et al.*, (2024) menunjukkan hasil bahwa belanja modal mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal itu sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadana *et al.*, (2023) dan Zamzami & Rakhman, (2023). Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola secara optimal dapat sangat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi di suatu wilayah dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah tanpa harus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga PAD dapat menjadi tolok ukur atas kinerja suatu pemerintah daerah.

Pada beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadilah & Andriani, (2025); Paulina & Supadmi, (2025); Pranita *et al.*, (2024); Dwi Apriani *et al.*, (2024) ; Novita & Arza (2024) ; Padang & Padang

(2023) sepakat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

3. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana Perimbangan dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah karena tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat dan mengurangi insentif daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi pengelolaan anggaran.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadilah & Andriani, (2025) memberikan hasil bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah. Hasil yang berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Paulina & Supadmi, (2025); Novita & Arza (2024) ; Pranita *et al.*, (2024) ; dan Padang & Padang (2023) yang menunjukkan bahwa Dana Perimbangan memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan kinerja keuangan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Novita & Arza (2024) ; Padang & Padang (2023) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan juga mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran diatas terkait pengaruh dana perimbangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diformulasikan dalam hipotesis berikut :

H₃ : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Dr. Aris Try Andreas Putra (2025), analisis data kuantitatif merupakan proses mengolah dan menginterpretasikan data berupa angka atau data numerik untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis atau menemukan pola hubungan antar variabel secara objektif dan sistematis.

B. Variabel Penelitian dan Pengukurannya

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Kinerja keuangan merupakan ukuran sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan Pembangunan pelayanan publik. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Rasio Kemandirian* yang mengukur nilai kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam rangka membiayai pembangunan, pelayanan publik dan urusan pemerintahan lainnya tanpa tergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Rasio Kemandirian merupakan salah satu metode untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penulis menggunakan data sekunder untuk penghitungan variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Realisasi

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang menggunakan indikator Rasio Kemandirian dapat dihitung dengan Rumus :

$$\text{Rasio Kemandirian : } \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Interpretasi Skor:

0-25% : Rendah sekali

25-50% : Rendah

50-75% : Sedang

75-100% : Tinggi

2. Variabel Independen

a. Belanja Modal (X1)

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal berpotensi besar untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja Modal yang tepat sasaran seperti pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik lainnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas masyarakat.

Belanja modal merupakan komponen yang memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap total belanja pemerintah Kabupaten/Kota baik pada realisasi tahun 2021, 2022, 2023 maupun tahun 2024.

Menurut Zamzami & Rakhman (2023), meningkatnya belanja modal mendorong kinerja pemerintah daerah. Berbagai regulasi pemerintah memastikan bahwa belanja modal akan sangat

membantu daerah dalam memperoleh sumber keuangan untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja Modal dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Belanja Modal :

Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan
+ Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya.

Sumber : Permendagri, (2020)

b. Pendapatan Asli Daerah (X2)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan yang penting dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Secara umum, peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan Pembangunan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Peningkatan PAD dapat menjadi indikator positif untuk kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan PAD yang tidak efisien dapat menghambat peningkatan kinerja keuangan. Kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi akan mendukung Pembangunan daerah dengan lebih efektif. (Andes Pranita, 2024)

Pendapatan Asli Daerah mempunyai empat sumber utama yaitu, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Oleh karena itu, rumus umum untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{PAD} = \text{PD} + \text{RD} + \text{PKD} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$$

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PD : Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

PKD : Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

c. Dana Perimbangan (X3)

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan system transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Rumus

Umum untuk menghitung besaran dana perimbangan di suatu daerah adalah sebagai berikut :

$$DP = DAU + DAK + DBH$$

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

Keterangan :

DP : Dana Perimbangan

DAU : Dana Alokasi Umum

DAK : Dana Alokasi Khusus

DBH : Dana Bagi Hasil

C. Sumber Data dan Responden

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Menurut Nur Indriantoro (2018), data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung tetapi melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2021-2024. Data diperoleh dari situs resmi www.jateng.bps.go.id dan www.djpk.kemenkeu.go.id.

2. Responden

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 29 Kabupaten dan 6 Kota di Jawa Tengah yang menerbitkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara publik dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Sampel penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, dimana sampel diambil dari seluruh populasi yang ada.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berupa dokumentasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari 29 Kabupaten dan 6 Kota yang berada di Jawa Tengah periode tahun 2021– 2024 yang diperoleh dari www.djpk.kemenkeu.go.id.

F. Metode dan Analisis Data

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah aplikasi *Statistik Package For The Social Science (SPSS)* versi 25. Tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Prof.Dr. Sugiyono (2018), analisis statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data, dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau

generalisasi. Statistik deskriptif meliputi data minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi yang digunakan untuk mengetahui distribusi data yang menjadi sampel penelitian.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi normal, maka hasil uji statistic akan mengalami penurunan. Menurut Ghazali (2018), pada uji normalitas data dapat dilakukan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan apabila hasil uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* menghasilkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2018), Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi yang digunakan ditemukan adanya korelasi antar variabel independennya. Multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan linear yang sempurna ataupun mendekati sempurna yang ditandai dengan adanya koefisien yang tinggi dan mendekati satu.

Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami multikolinearitas, dapat dilakukan dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (R^2) dengan nilai determinasi secara serentak (R^2), serta dapat menganalisis nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dari *output* yang dihasilkan SPSS. Jika mendapatkan nilai *tolerance* $> 10\%$ dan $VIF < 10$, maka tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas; sebaliknya jika *tolerance* $< 10\%$ dan $VIF > 10$, maka terdapat indikasi multikolinearitas dalam model regresi.

c. *Uji Heteroskedastisitas*

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas.

Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan menggunakan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SREID (nilai residualnya). Terdapat beberapa metode untuk menguji heteroskedastisitas, antara lain Uji Glejser, Uji Rank Spearman, Uji Park, dan Uji Scatterplot. Metode yang sering digunakan adalah Uji Glejser, di mana pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan nilai probabilitas (sig); jika nilai $\text{sig} > 0,05$, maka tidak terjadi

heteroskedastisitas, sedangkan jika $\text{sig} < 0,05$, maka terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu dalam model regresi linear pada periode t dengan periode $t-1$, Ghazali (2018). Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami autokorelasi. Untuk dapat menentukan apakah model regresi ini mengalami autokorelasi, maka digunakan uji Durbin-Watson. Dimana hasil dari Uji Durbin-Watson dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Apabila $0 < DW < DL$ maka H_0 ditolak dan menunjukkan bahwa terjadi autokorelasi positif.
- 2) Apabila $DL \leq DW \leq DU$ maka tidak ada kepastian atau kesimpulan.
- 3) Apabila $4-DL < DW < 4$ maka H_0 ditolak dan menunjukkan bahwa terjadi autokorelasi negatif.
- 4) Apabila $4-DU \leq DW \leq 4-DL$ maka tidak ada kepastian atau kesimpulan.
- 5) Apabila $DU < DW < 4-DU$ maka H_0 diterima dan menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

a. Model Persamaan Regresi Linear Berganda

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda. Alasan peneliti memilih model regresi linier berganda dikarenakan variable independent yang terdapat dalam penelitian ini lebih dari satu yaitu Belanja Modal (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2) dan Dana Perimbangan (X3). Sehingga model regresi ini cocok digunakan karena selain dapat mengukur hubungan antara dua variabel juga dapat menunjukkan arah hubungan antar variable independent dengan variabel dependen. Bentuk umum persamaan statistik yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

α : Nilai Konstanta

X1 : Belanja Modal

X2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X3 : Dana Perimbangan

$\beta_1 - \beta_3$: Koefisien regresi dari masing-masing variable

ε : Variabel lain yang tidak diteliti

b. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji Statistik F atau Uji kelayakan model dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independent terhadap variabel

dependen, serta untuk menentukan apakah model regresi yang dibentuk sesuai (fit) dengan data observasi yang ada. Jika nilai signifikasi $F < \alpha$ (0,05), maka model tersebut dikatakan fit dengan data observasi, yang berarti variabel independent mampu menjelaskan variabel dependen secara signifikan, Ghozali (2018).

c. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara parsial, Ghozali (2018). Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel Coefficients. Biasanya dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau dengan taraf signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Berikut ini adalah kriteria dari uji statistik t :

- 1) Apabila nilai signifikansi uji t $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Apabila nilai signifikansi uji t $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

d. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi bertujuan untuk menilai dan mengukur kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh variabel independent secara keseluruhan terhadap variabel dependen, yang

dapat diindikasikan oleh nilai adjusted R-Square, Ghazali (2018). Nilai koefisien determinasi (*adjusted R-Square*) berkisar antara nol hingga satu. Semakin mendekati satu nilai tersebut, semakin besar kemampuan variabel independen dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terpublikasi di www.jateng.bps.go.id dan TKDD yang bersumber dari www.djpk.kemenkeu.go.id. Sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah periode Tahun Anggaran 2021-2023. Pengambilan Sampel dilakukan menggunakan *sampling jenuh*, yaitu Teknik pengambilan sampel Dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Pengambilan data penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Pengambilan Data Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1.	Pemerintah Kabupaten yang berada di wilayah Jawa Tengah	29
2.	Pemerintah kota yang berada di wilayah Jawa Tengah	6
Jumlah Sampel Penelitian		35
3.	Jumlah pengamatan (4 tahun x 35)	140
4.	Data Outlier	(6)
Observasi setelah data outlier		134

Sumber : Lampiran 1

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh sampel sebanyak 35 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama 4 Tahun Anggaran, sehingga total data mencapai 140 observasi. Namun dalam proses pengolahan data ditemukan 6 *outlier* yang dapat menyebabkan bias residual data yang signifikan dan berpotensi merusak hasil penelitian secara keseluruhan. Oleh karena hal tersebut, maka *outlier* tersebut dikeluarkan dari analisis, sehingga jumlah observasi yang layak diujikan menjadi 134 data. Nama daerah kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4. 2
Data Sampel Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

No	Nama Daerah	No	Nama Daerah
1	Kabupaten Cilacap	19	Kabupaten Kudus
2	Kabupaten Banyumas	20	Kabupaten Jepara
3	Kabupaten Purbalingga	21	Kabupaten Demak
4	Kabupaten Banjarnegara	22	Kabupaten Semarang
5	Kab. Kebumen	23	Kabupaten Temanggung
6	Kabupaten Purworejo	24	Kabupaten Kendal
7	Kabupaten Wonosobo	25	Kabupaten Batang
8	Kabupaten Magelang	26	Kabupaten Pekalongan
9	Kabupaten Boyolali	27	Kabupaten Pemalang
10	Kabupaten Klaten	28	Kabupaten Tegal
11	Kabupaten Sukoharjo	29	Kabupaten Brebes
12	Kabupaten Wonogiri	30	Kota Magelang

No	Nama Daerah	No	Nama Daerah
13	Kabupaten Karanganyar	31	Kota Surakarta
14	Kabupaten Sragen	32	Kota Salatiga
15	Kabupaten Grobogan	33	Kota Semarang
16	Kabupaten Blora	34	Kota Pekalongan
17	Kabupaten Rembang	35	Kota Tegal
18	Kabupaten Pati		

Sumber : Lampiran 2

B. Deskripsi Data Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan yang berpengaruh pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Data yang digunakan adalah data Pemerintah Daerah 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2021 sampai tahun 2024 sehingga didapatkan 140 data observasi. Data masing-masing variabel diperoleh dari www.djpk.kemenkeu.go.id seperti yang tersaji dalam Lampiran 3 dan menghasilkan data penelitian yang diolah pada Lampiran 4.

Setelah dilakukan uji asumsi klasik (uji normalitas dan deteksi *outlier*), ditemukan 6 data observasi yang dikategorikan sebagai *outlier* (data ekstrim) karena memiliki nilai terlalu jauh diatas rata-rata kelompoknya. Detail 6 *Outlier* dapat dilihat pada Lampiran 5.

Untuk menghindari bias pada hasil regresi linear berganda, 6 data *outlier* tersebut dikeluarkan dari sampel, sehingga total sampel bersih

yang digunakan dalam analisis akhir adalah 134 data seperti yang tersaji dalam tabel di Lampiran 6.

C. Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Uji Statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menunjukkan nilai rata-rata (*mean*), *minimum*, *maximum*, dan *standart deviation* pada masing-masing variabel penelitian. Adapun hasil uji statistik deskriptif pada penelitian ini tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	134	75.19	583.81	276.3531	106.55303
PAD	134	173.98	903.57	433.4319	137.47917
DP	134	532.90	2246.54	1378.6261	369.67713
KKPD	134	10.48	34.55	19.6371	5.34364
Valid N (listwise)	134				

Sumber : Lampiran 7

Berdasarkan hasil yang disajikan pada tabel 4.5 Uji deskriptif Kinerja Keuangan memperoleh hasil *mean* sebesar 19,6371 dengan nilai *minimum* 10,48 dan nilai *maximum* berada pada angka 34,55. Sedangkan untuk nilai *standart deviation* sebesar 5,34364.

Selanjutnya adalah hasil uji statistik deskriptif untuk variabel Belanja Modal menghasilkan nilai mean sebesar 276,3531 dengan

nilai *minimum* pada angka 75,19 dan nilai *maximum* sebesar 583,81. Sedangkan nilai *standard deviation* sebesar 106,55303.

Uji statistic deskriptif Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperoleh hasil mean sebesar 433,4319 dengan nilai *minimum* 173,98 dan nilai *maximum* 903,57. Sedangkan nilai *standard deviation*nya berada pada nilai 137,47917.

Uji statistik deskriptif Dana Perimbangan menunjukkan hasil mean sebesar 1.378,6261 dengan nilai *minimum* sebesar 532,9 dan nilai *maximum* sebesar 2.246,54. Sedangkan nilai *standard deviation* nya 369,67713.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Pada penelitian ini menggunakan uji normalitas *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan kriteria apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Hasil uji normalitas disajikan dalam table berikut :

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas

Variabel	Sig.	Standar	Kesimpulan
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200	> 0,05	Terdistribusi Normal

Sumber : Lampiran 8

Hasil pengujian yang tersaji dari tabel diatas menunjukkan nilai *Asymp.Sig* adalah 0,200 yang berarti telah melebihi standar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel memiliki data yang berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan ada tidaknya korelasi antar variabel bebas. Apabila hasil pengujian menunjukkan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka tidak terdapat multikolinearitas.

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas

	<i>Tolerance</i>	<i>Std</i>	<i>VIF</i>	<i>Std</i>	<i>Keterangan</i>
BM	0,549	> 0,10	1,823	< 10	Tidak terjadi multikolinearitas
PAD	0,597	> 0,10	1,676	< 10	Tidak terjadi multikolinearitas
DP	0,531	> 0,10	1,883	< 10	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Lampiran 9

Hasil dari tabel 4.7 diatas menunjukkan hasil bahwa, nilai *tolerance* pada setiap variable lebih dari 0,10 dan nilai *VIF* pada setiap variable lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa data yang dianalisis tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut heterokedastisitas. Pada penelitian ini pengujian dilakukan dengan metode *Glejser* dengan pengambilan Keputusan jika nilai probabilitas (sig) $> 0,05$ maka tidak terjadi heterokedastisitas dan jika nilai probabilitas (sig) $< 0,05$ maka terjadi heterokedastisitas. Hasil pengujian yang baik seharusnya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas disajikan dalam table dibawah ini :

Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

	<i>Sig</i>	<i>Std</i>	Keterangan
BM	0,411	$> 0,05$	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
PAD	0,244	$> 0,05$	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
DP	0,204	$> 0,05$	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Lampiran 10

Hasil perhitungan uji heterokedastisitas pada tabel 4.9 menunjukkan tidak ada *p-value* kurang dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas dalam proses estimasi parameter model penduga. Jadi secara

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heterokedastisitas dalam penelitian ini.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam penelitian model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Pada penelitian ini menggunakan uji *Durbin Watson* (uji-DW). Berdasarkan pengujian pada metode ini, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak terjadi autokorelasi apabila $du < dw < 4-du$. Hasil pengujian tersaji dalam table di bawah ini :

Tabel 4.7

Hasil Uji Autokorelasi

DW	DL	DU	4-DU	4-DL	Keterangan
1,945	1,6724	1,7638	2,2362	2,3276	Tidak terjadi Autokorelasi

Sumber : Lampiran 11

Hasil uji autokorelasi diatas memperoleh hasil bahwa nilai DW sebesar 1,945. Berdasarkan tabel *Durbin Watson (DW)* dengan $k=3$ dan $n=134$ maka diperoleh $du = 1,7638$ dan $4-du = 2,2362$. Hal ini menunjukkan bahwa nilai DW masuk ke dalam kriteria $du < dw < 4-du$ ($1,7638 < 1,945 < 2,2362$) yang berarti model dalam penelitian ini telah terbebas dari autokorelasi.

3. Uji Regresi Linier Berganda

a. Model Regresi

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dengan persamaan berikut ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Tabel 4.8
Hasil Uji Model Regresi

	Unstandardized Coefficient B
(Constanst)	12,001
BM	-0,002
PAD	0,032
DP	-0,013

Sumber : Lampiran 12

Berdasarkan hasil yang tersaji dalam tabel diatas ditulis dengan persamaan :

$$KKPD = 12,001 - 0,002 \text{ BM} + 0,032 \text{ PAD} - 0,013 \text{ DP} + \varepsilon$$

Interprestasi hasil dan analisis sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 12,001 artinya Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dalam model diasumsikan bernilai 0 atau konstan maka Kinerja Keuangan mengalami kenaikan sebesar 12,001.
2. Besarnya nilai koefisien Belanja Modal sebesar -0,002 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan Belanja Modal, nilai Kinerja Keuangan (Y) akan berkurang sebesar 0,002.

3. Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah adalah 0,0032 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan PAD, nilai kinerja keuangan akan meningkat sebesar 0,0032.
4. Besarnya nilai koefisien Dana Perimbangan sebesar -0,013 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan Dana Perimbangan, nilai Kinerja Keuangan akan berkurang sebesar 0,013.

b. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji besarnya pengaruh dari variabel independent secara Bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 4.9

Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Keterangan	<i>F</i> <i>Hitung</i>	F Tabel	Sig.	Kriteria	Hasil
Uji Kelayakan model (F)	177,560	>3,07	0,001	< 0,05	Model Layak

Sumber : Lampiran 13

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 293,359. Jika dimasukkan ke dalam kriteria maka F hitung > F tabel ($293,359 > 3,07$) dengan Tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan.

c. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen dalam persamaan regresi secara parsial dengan asumsi variable lain dianggap konstan. Pengambilan Keputusan berdasarkan nilai signifikansi 0,05 dan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel yang ditemukan.

Tabel 4.10
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Hipotesis	T Hitung	T Tabel	Sig.	Kriteria	Keterangan
H1 (BM)	0,966	< 1,978	0,336	< 0,05	Ditolak
H2 (PAD)	20,044	> 1,978	0,001	< 0,05	Diterima
H3 (DP)	18,419	> 1,978	0,001	< 0,05	Diterima

Sumber : Lampiran 14

Berdasarkan hasil dari Uji Hipotesis (Uji t) pada tabel diatas, diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,984. Maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil pengujian pada variabel Belanja Modal menunjukkan bahwa $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($0,966 < 1,978$) dan nilai sig $< 0,05$ ($0,336 > 0,05$). Hal ini berarti menolak H1 dan dapat disimpulkan bahwa Belanja modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2) Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($20,044 > 1,978$) dengan nilai $\text{Sig.} < 0,05$ ($0,001 < 0,05$). Hal ini berarti menerima H_2 dan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

3) Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian pada variabel Dana Perimbangan mendapatkan hasil bahwa $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($18,419 > 1,978$) dan nilai $\text{sig} < 0,05$ ($0,001 < 0,05$). Hal ini berarti menerima H_3 dan dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

d. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian ini bertujuan untuk dapat mengetahui presentase besarnya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) pada penelitian ini, disajikan dalam table berikut :

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Adjusted R Square</i>	Kesimpulan
0,802	Variabel independent berpengaruh sebesar 80% terhadap Variabel dependen

Sumber : Lampiran 15

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil *Adjusted R-Square* sebesar 80 % dipengaruhi oleh variabel PAD dan Dana Perimbangan, sedangkan 20 % sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis 1 seperti yang tersaji pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwi Apriani et al., (2024) menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Demikian pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Padang & Padang, (2023) yang juga menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil hipotesis kedua seperti yang tersaji pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin meningkat Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari potensi daerah memungkinkan Pemerintah Daerah untuk dapat lebih mandiri dalam membiayai program dan kegiatan Pembangunan. Selain itu, PAD yang dikelola dengan baik akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan public, dan mendorong akuntabilitas serta transparansi. Hal tersebut, akan meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah secara keseluruhan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadilah & Andriani, (2025) yang menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranita et al., (2024). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Novita & Arza, (2024) juga menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian pada hipotesis ketiga seperti yang tersaji dalam tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi Dana Perimbangan, maka semakin menurun kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat menunjukkan tingkat kemandirian pemerintah daerah tersebut. Pemerintah Daerah yang semakin bergantung pada Dana Perimbangan, maka kinerja keuangannya akan semakin menurun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novita & Arza, (2024) yang menunjukkan bahwa Dana Perimbangan mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil yang sama ditunjukkan didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Paulina & Supadmi, 2025);Andes Pranita (2024) ; dan Padang & Padang (2023).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah 35 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah mulai dari tahun 2021-2024. Pemilihan Sampel dilakukan dengan menggunakan metode sampling jenuh. Dari 140 data yang terkumpul, ditemukan ada 6 *outlier* sehingga menghasilkan 134 observasi untuk dapat dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda yang diolah menggunakan SPSS versi 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja modal yang tidak dialokasikan secara tepat.maka tidak akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga tidak berpengaruh terhadap kemandirian kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan disisi lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal itu menunjukkan bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah, maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah akan semakin meningkat. Dana Perimbangan juga

mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah, sama halnya dengan PAD. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi Dana Perimbangan maka akan menurunkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, karena daerah yang masih bergantung pada dana transfer dari pusat maka akan menurunkan kemandirian keuangan daerah tersebut.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa kendala dan keterbatasan mulai dari proses, isi, pengumpulan data sampai dengan penyajian hasil. Karena objek pada penelitian ini terbatas hanya terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah Pemerintah Daerah yang di observasi terbatas hanya sebanyak 134 sampel yang diambil dari 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 4 tahun mulai dari tahun 2021-2024, sehingga menyebabkan hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran untuk penelitian selanjutnya supaya hasil dapat digeneralisasikan sebaiknya peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan objek penelitian dengan menggunakan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andes Pranita, et. a. (2024). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi 10 Nomor 2*. <https://financial.ac.id/index.php/financial>
- Dr. Aris Try Andreas Putra. (2025). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Amerta Media.
- Dwi Apriani, R., Wahyu Setiyowati, S., & Fariz Irianto, M. (2024). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemda Se Jawa Timur Tahun 2020-2022). In *Jurnal Akuntansi* (Vol. 13, Issue 1). <http://ejournal.utmj.ac.id/index.php/akuntansi>
- Fadilah, A. F., & Andriani, S. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 23(1), 179–198. <https://doi.org/10.24167/jab.v23i1.13363>
- Fitri, N. A., Arkan, M., Mina, M., & Vharhaty, I. (2024). The Effect of Capital Expenditure, Balancing Funds and Regional Original Revenue on the Financial Performance of the Bireuen District Government in the 2005-2023 Fiscal Year Proceeding 2 nd Medan International Economics and Business. *Proceeding 2 Nd Medan International Economics and Business*, 2(1), 1967–1975.
- Lestari, M. P. M. T. Y. A. N. F. (2024). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah

Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 13(1), 19–38.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.

Masdar, R., Furqan, A. C., & Meldawati, L. (2025). The Influence of Local Original Revenue and Capital Expenditure on the Financial Performance of District / City Governments in Central Sulawesi Province in 2019-2023. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics*, 4(1), 161–174.

Novita, R., & Arza, F. I. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2021. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(1), 430–443. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1367>

Nur Indriantoro dan Bambang Supono. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Penerbit ANdi.

Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). The Influence of Local Original Revenue (PAD), Balancing Funds, and Capital Expenditures on the Financial Performance of Local Governments in Districts/Cities of North Sumatra Province. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(2), 303–318.

Paulina, N. N. W., & Supadmi, N. L. (2025). The Effect of Regional Original Revenue, Transfer Revenue, and Regional Expenditure on Regional Government Financial Performance (A Study of Regencies and Cities in The Province of Bali, 2019-2023). *International Journal of Economics*,

Commerce, and Management, 2(3), 90–97.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://doi.org/10.1093/oed/9600622025>

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, 09 Desember LN. 2005 No. 137 (2005). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49713/pp-no-55-tahun-2005%0Ahttps://peraturan.bpk.go.id/Details/49713/pp-no-55-tahun-2005>

Permendagri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. *Permendagri No 77 Tahun 2020*, 1–445.

Pranita, A., Masnila, N., Husni Mubarak, M., Akuntansi, J., Negeri Sriwijaya, P., & Selatan, S. (2024). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 10. <https://financial.ac.id/index.php/financial>

Pratama, D. P., Mustika, I. G., & Karpriana, A. P. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2013-2022. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.*, 8(4), 720–732. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v8i4.1609>

Prof.Dr. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.

Ramadana, S. W., Mariana, M., Rahmaniari, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi

- Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Owner*, 7(2), 1831–1840.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>
- Sundari, A. D., & Pramesti, W. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(2), 1671–1683.
- Teresa Ona Delang, R. R. S. (2024). The Effect of Capital Expenditure on Regional Financial Performance with Local Original Income as an intervening Variable in Districts and Cities in NTT Province in 2017-2021. *Journal Syntax Transformation*, 29(2), 1–24. <https://doi.org/10.37202/kmmr.2024.29.2.1>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (2014).
- Widiatmika, K. P. (2024). Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah 2022 dan 2023. In *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah* (Vol. 33).
- Zamzami, F., & Rakhman, F. (2023). Determinants of Local Government Financial Performance in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(5), 332–347. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0148>

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1.	Pemerintah Kabupaten yang berada di wilayah Jawa Tengah	29
2.	Pemerintah kota yang berada di wilayah Jawa Tengah	6
Jumlah Sampel Penelitian		35
3.	Jumlah pengamatan (4 tahun x 35)	140
4.	Data Outlier	(6)
Observasi setelah data outlier		134

Lampiran 2. Data Sampel Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

No	Nama Daerah	No	Nama Daerah
1	Kabupaten Cilacap	19	Kabupaten Kudus
2	Kabupaten Banyumas	20	Kabupaten Jepara
3	Kabupaten Purbalingga	21	Kabupaten Demak
4	Kabupaten Banjarnegara	22	Kabupaten Semarang
5	Kab. Kebumen	23	Kabupaten Temanggung
6	Kabupaten Purworejo	24	Kabupaten Kendal
7	Kabupaten Wonosobo	25	Kabupaten Batang
8	Kabupaten Magelang	26	Kabupaten Pekalongan
9	Kabupaten Boyolali	27	Kabupaten Pemalang
10	Kabupaten Klaten	28	Kabupaten Tegal
11	Kabupaten Sukoharjo	29	Kabupaten Brebes
12	Kabupaten Wonogiri	30	Kota Magelang
13	Kabupaten Karanganyar	31	Kota Surakarta
14	Kabupaten Sragen	32	Kota Salatiga
15	Kabupaten Grobogan	33	Kota Semarang
16	Kabupaten Blora	34	Kota Pekalongan
17	Kabupaten Rembang	35	Kota Tegal
18	Kabupaten Pati		

Lampiran 3. Hasil Tabulasi Data

a. Kinerja Keuangan

$$\text{Rasio Kemandirian : } \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dinyatakan Dalam Jutaan Rupiah

NO	NAMA DAERAH	PERIODE	PAD	Total PD	KKPD
1	Kab. Banjarnegara	2021	313,83	2.086,00	15,04
		2022	284,50	2.044,54	13,92
		2023	335,50	2.154,56	15,57
		2024	385,23	2.340,25	16,46
2	Kab. Banyumas	2021	762,00	3.487,72	21,85
		2022	822,68	3.426,40	24,01
		2023	854,94	3.498,41	24,44
		2024	903,57	3.793,67	23,82
3	Kab. Batang	2021	322,78	1.821,82	17,72
		2022	300,96	1.750,95	17,19
		2023	327,78	1.807,57	18,13
		2024	292,09	1.952,46	14,96
4	Kab Blora	2021	326,77	2.227,06	14,67
		2022	325,96	2.176,85	14,97
		2023	359,48	2.423,98	14,83
		2024	428,66	2.616,05	16,39
5	Kab. Boyolali	2021	514,97	2.430,23	21,19
		2022	444,69	2.372,37	18,74
		2023	494,47	2.444,30	20,23
		2024	538,70	2.455,46	21,94
6	Kab. Brebes	2021	518,51	3.162,14	16,40
		2022	419,39	2.989,82	14,03
		2023	479,93	3.075,01	15,61
		2024	613,89	3.529,60	17,39
7	Kab. Cilacap	2021	739,13	3.334,30	22,17
		2022	700,42	3.293,13	21,27
		2023	768,64	3.476,51	22,11
		2024	885,06	3.842,57	23,03
8	Kab. Demak	2021	445,00	2.365,24	18,81
		2022	477,19	2.402,71	19,86
		2023	508,05	2.416,78	21,02
		2024	594,88	2.704,16	22,00
9	Kab. Grobogan	2021	424,18	2.634,88	16,10
		2022	424,75	2.588,63	16,41
		2023	432,85	2.669,56	16,21
		2024	519,14	2.951,40	17,59
10	Kab. Jepara	2021	408,63	2.380,70	17,16
		2022	427,51	2.326,93	18,37
		2023	446,09	2.343,27	19,04
		2024	497,78	2.549,84	19,52
11	Kab. Karanganyar	2021	426,65	2.165,98	19,70
		2022	511,73	2.251,54	22,73
		2023	441,86	2.255,39	19,59
		2024	453,87	2.519,42	18,01
12	Kab. Kebumen	2021	472,00	2.832,03	16,67
		2022	512,34	2.847,19	17,99
		2023	463,65	2.901,02	15,98
		2024	484,29	3.137,69	15,43
13	Kab. Kendal	2021	439,20	2.300,54	19,09
		2022	437,90	2.265,35	19,33
		2023	543,91	2.452,99	22,17
		2024	517,11	2.517,76	20,54
14	Kab. Klaten	2021	315,30	2.570,03	12,27
		2022	358,05	2.587,70	13,84
		2023	339,09	2.672,89	12,69
		2024	372,12	2.769,79	13,43

NO	NAMA DAERAH	PERIODE	PAD	Total PD	KKPD
15	Kab. Kudus	2021	507,16	2.163,63	23,44
		2022	418,70	2.078,76	20,14
		2023	502,36	2.276,18	22,07
		2024	511,08	2.157,43	23,69
16	Kab. Magelang	2021	375,37	2.469,75	15,20
		2022	432,68	2.558,02	16,91
		2023	465,48	2.573,48	18,09
		2024	520,85	2.780,53	18,73
17	Kab. Pati	2021	388,64	2.725,20	14,26
		2022	388,75	2.705,05	14,37
		2023	441,00	2.758,69	15,99
		2024	482,69	2.943,32	16,40
18	Kab Pekalongan	2021	346,60	2.078,54	16,68
		2022	305,31	2.074,62	14,72
		2023	342,12	2.200,23	15,55
		2024	430,12	2.368,80	18,16
19	Kab. Pemalang	2021	365,40	2.605,03	14,03
		2022	321,26	2.493,41	12,88
		2023	312,12	2.572,34	12,13
		2024	365,86	2.755,59	13,28
20	Kab. Purbalingga	2021	377,88	2.054,84	18,39
		2022	306,19	2.022,88	15,14
		2023	341,09	2.066,97	16,50
		2024	258,55	2.008,37	12,87
21	Kab. Purworejo	2021	438,26	2.290,24	19,14
		2022	330,27	2.185,98	15,11
		2023	379,93	2.256,52	16,84
		2024	448,72	2.653,99	16,91
22	Kab. Rembang	2021	404,10	1.911,32	21,14
		2022	353,09	1.841,48	19,17
		2023	342,02	1.895,23	18,05
		2024	394,99	2.042,04	19,34
23	Kab. Semarang	2021	575,75	2.417,28	23,82
		2022	480,30	2.337,45	20,55
		2023	530,15	2.393,41	22,15
		2024	597,79	2.566,48	23,29
24	Kab. Sragen	2021	537,26	2.336,72	22,99
		2022	364,48	2.177,84	16,74
		2023	406,00	2.303,44	17,63
		2024	468,24	2.433,53	19,24
25	Kab. Sukoharjo	2021	528,35	2.119,63	24,93
		2022	495,28	2.014,81	24,58
		2023	537,10	2.160,89	24,86
		2024	553,60	2.241,42	24,70
26	Kab. Tegal	2021	591,00	2.862,55	20,65
		2022	531,15	2.743,15	19,36
		2023	553,33	2.812,58	19,67
		2024	612,18	2.964,92	20,65
27	Kab. Temanggung	2021	363,12	1.971,00	18,42
		2022	308,70	1.895,48	16,29
		2023	350,28	2.003,87	17,48
		2024	388,86	2.101,48	18,50
28	Kab. Wonogiri	2021	241,30	2.303,56	10,48
		2022	332,81	2.262,26	14,71
		2023	287,87	2.507,48	11,48
		2024	306,54	2.473,36	12,39

NO	NAMA DAERAH	PERIODE	PAD	Total PD	KKPD
29	Kab. Wonosobo	2021	339,74	1.967,78	17,27
		2022	264,94	1.921,19	13,79
		2023	267,06	2.057,28	12,98
		2024	307,37	2.105,85	14,60
30	Kota Magelang	2021	319,39	994,37	32,12
		2022	377,36	985,76	38,28
		2023	324,67	1.012,64	32,06
		2024	349,05	1.012,28	34,48
31	Kota Pekalongan	2021	252,00	966,37	26,08
		2022	263,47	989,01	26,64
		2023	263,35	1.028,43	25,61
		2024	271,12	1.016,32	26,68
32	Kota Salatiga	2021	280,68	946,19	29,66
		2022	240,95	918,35	26,24
		2023	284,53	987,27	28,82
		2024	313,97	1.038,15	30,24
33	Kota Semarang	2021	2.385,94	4.822,88	49,47
		2022	2.545,99	4.969,43	51,23
		2023	2.835,15	5.352,87	52,97
		2024	2.885,77	5.467,85	52,78
34	Kota Surakarta	2021	560,58	1.939,26	28,91
		2022	647,44	2.028,43	31,92
		2023	687,32	1.989,20	34,55
		2024	559,35	1.330,27	42,05
35	Kota Tegal	2021	308,11	1.030,98	29,89
		2022	340,05	1.042,63	32,62
		2023	336,84	1.052,24	32,01
		2024	378,52	1.122,79	33,71

b. Belanja Modal

Dinyatakan Dalam Jutaan Rupiah

NO	NAMA DAERAH	PERIODE	BELANJA MODAL
1	Kab. Banjarnegara	2021	294,84
		2022	191,79
		2023	238,34
		2024	235,21
2	Kab. Banyumas	2021	432,23
		2022	479,04
		2023	333,50
		2024	436,94
3	Kab. Batang	2021	196,08
		2022	183,19
		2023	139,57
		2024	175,11
4	Kab Blora	2021	298,44
		2022	507,66
		2023	362,50
		2024	298,67
5	Kab. Boyolali	2021	443,84
		2022	567,08
		2023	453,92
		2024	288,53
6	Kab. Brebes	2021	439,32
		2022	480,67
		2023	357,92
		2024	474,55
7	Kab. Cilacap	2021	583,81
		2022	537,11
		2023	468,85
		2024	423,25
8	Kab. Demak	2021	279,92
		2022	344,30
		2023	272,53
		2024	279,19
9	Kab. Grobogan	2021	290,18
		2022	462,22
		2023	363,90
		2024	332,47
10	Kab. Jepara	2021	231,97
		2022	196,29
		2023	210,16
		2024	187,18
11	Kab. Karanganyar	2021	193,82
		2022	253,01
		2023	253,72
		2024	333,81
12	Kab. Kebumen	2021	266,11
		2022	272,30
		2023	278,84
		2024	278,74
13	Kab. Kendal	2021	141,15
		2022	338,36
		2023	305,97
		2024	212,88
14	Kab. Klaten	2021	189,60
		2022	246,67
		2023	295,60
		2024	273,58
15	Kab. Kudus	2021	155,22
		2022	379,32
		2023	418,86
		2024	310,21
16	Kab. Magelang	2021	251,16
		2022	304,00
		2023	318,00
		2024	300,09
17	Kab. Pati	2021	271,12
		2022	240,76
		2023	212,13
		2024	269,32
18	Kab Pekalongan	2021	208,04
		2022	261,15
		2023	266,77
		2024	331,96

NO	NAMA DAERAH	PERIODE	BELANJA MODAL
19	Kab. Pemalang	2021	180,04
		2022	150,61
		2023	217,20
		2024	136,88
20	Kab. Purbalingga	2021	196,96
		2022	239,86
		2023	139,11
		2024	97,88
21	Kab. Purworejo	2021	266,46
		2022	419,62
		2023	263,30
		2024	195,73
22	Kab. Rembang	2021	187,28
		2022	280,27
		2023	306,99
		2024	158,81
23	Kab. Semarang	2021	292,00
		2022	368,03
		2023	255,14
		2024	254,62
24	Kab. Sragen	2021	211,72
		2022	351,88
		2023	433,41
		2024	240,53
25	Kab. Sukoharjo	2021	283,87
		2022	220,46
		2023	292,71
		2024	234,71
26	Kab. Tegal	2021	368,87
		2022	313,68
		2023	358,32
		2024	339,16
27	Kab. Temanggung	2021	235,99
		2022	247,09
		2023	174,71
		2024	164,56
28	Kab. Wonogiri	2021	364,22
		2022	301,73
		2023	372,94
		2024	203,28
29	Kab. Wonosobo	2021	256,22
		2022	363,43
		2023	329,90
		2024	237,32
30	Kota Magelang	2021	186,00
		2022	154,81
		2023	151,57
		2024	166,12
31	Kota Pekalongan	2021	160,51
		2022	196,56
		2023	170,65
		2024	119,32
32	Kota Salatiga	2021	130,27
		2022	75,19
		2023	91,95
		2024	105,44
33	Kota Semarang	2021	953,67
		2022	1.048,84
		2023	1.089,35
		2024	1.103,98
34	Kota Surakarta	2021	341,10
		2022	380,83
		2023	380,39
		2024	213,64
35	Kota Tegal	2021	146,32
		2022	144,27
		2023	90,73
		2024	82,07

c. Pendapatan Asli Daerah

Dinyatakan Dalam Jutaan Rupiah

NO	NAMA DAERAH	PERIODE	PENDAPATAN ASLI DAERAH
1	Kab. Banjarnegara	2021	313,83
		2022	284,50
		2023	335,50
		2024	385,23
2	Kab. Banyumas	2021	762,00
		2022	822,68
		2023	854,94
		2024	903,57
3	Kab. Batang	2021	322,78
		2022	300,96
		2023	327,78
		2024	292,09
4	Kab Blora	2021	326,77
		2022	325,96
		2023	359,48
		2024	428,66
5	Kab. Boyolali	2021	514,97
		2022	444,69
		2023	494,47
		2024	538,70
6	Kab. Brebes	2021	518,51
		2022	419,39
		2023	479,93
		2024	613,89
7	Kab. Cilacap	2021	739,13
		2022	700,42
		2023	768,64
		2024	885,06
8	Kab. Demak	2021	445,00
		2022	477,19
		2023	508,05
		2024	594,88
9	Kab. Grobogan	2021	424,18
		2022	424,75
		2023	432,85
		2024	519,14
10	Kab. Jepara	2021	408,63
		2022	427,51
		2023	446,09
		2024	497,78
11	Kab. Karanganyar	2021	426,65
		2022	511,73
		2023	441,86
		2024	453,87
12	Kab. Kebumen	2021	472,00
		2022	512,34
		2023	463,65
		2024	484,29
13	Kab. Kendal	2021	439,20
		2022	437,90
		2023	543,91
		2024	517,11
14	Kab. Klaten	2021	315,30
		2022	358,05
		2023	339,09
		2024	372,12
15	Kab. Kudus	2021	507,16
		2022	418,70
		2023	502,36
		2024	511,08
16	Kab. Magelang	2021	375,37
		2022	432,68
		2023	465,48
		2024	520,85
17	Kab. Pati	2021	388,64
		2022	388,75
		2023	441,00
		2024	482,69
18	Kab Pekalongan	2021	346,60
		2022	305,31
		2023	342,12
		2024	430,12

NO	NAMA DAERAH	PERIODE	PENDAPATAN ASLI DAERAH
19	Kab. Pemalang	2021	365,40
		2022	321,26
		2023	312,12
		2024	365,86
20	Kab. Purbalingga	2021	377,88
		2022	306,19
		2023	341,09
		2024	258,55
21	Kab. Purworejo	2021	438,26
		2022	330,27
		2023	379,93
		2024	448,72
22	Kab. Rembang	2021	404,10
		2022	353,09
		2023	342,02
		2024	173,98
23	Kab. Semarang	2021	575,75
		2022	480,30
		2023	530,15
		2024	597,79
24	Kab. Sragen	2021	537,26
		2022	364,48
		2023	406,00
		2024	468,24
25	Kab. Sukoharjo	2021	528,35
		2022	495,28
		2023	537,10
		2024	553,60
26	Kab. Tegal	2021	591,00
		2022	531,15
		2023	553,33
		2024	612,18
27	Kab. Temanggung	2021	363,12
		2022	308,70
		2023	350,28
		2024	388,86
28	Kab. Wonogiri	2021	241,30
		2022	332,81
		2023	287,87
		2024	306,54
29	Kab. Wonosobo	2021	339,74
		2022	264,94
		2023	267,06
		2024	307,37
30	Kota Magelang	2021	319,39
		2022	377,36
		2023	324,67
		2024	349,05
31	Kota Pekalongan	2021	252,00
		2022	263,47
		2023	263,35
		2024	271,12
32	Kota Salatiga	2021	280,68
		2022	240,95
		2023	284,53
		2024	313,97
33	Kota Semarang	2021	2.385,94
		2022	2.545,99
		2023	2.835,15
		2024	2.885,77
34	Kota Surakarta	2021	560,58
		2022	647,44
		2023	687,32
		2024	559,35
35	Kota Tegal	2021	308,11
		2022	340,05
		2023	336,84
		2024	378,52

d. Dana Perimbangan

$$DP = DAU + DAK + DBH$$

Dinyatakan Dalam Jutaan Rupiah

NO	NAMA DAERAH	PERIODE	DANA PERIMBANGAN				JUMLAH DP
			DBH	DAK		DAU	
				FISIK	NON FISIK		
1	Kab. Banjarnegara	2021	46,67	73,98	246,79	895,96	1.263,40
		2022	49,24	68,53	312,22	895,96	1.325,95
		2023	39,90	52,33	326,17	940,26	1.358,66
		2024	32,60	92,25	327,02	958,97	1.410,84
2	Kab. Banyumas	2021	61,56	191,69	370,47	1.289,63	1.913,35
		2022	62,39	111,99	514,90	1.289,63	1.978,91
		2023	53,34	86,97	546,20	1.352,88	2.039,39
		2024	43,98	159,50	555,32	1.404,50	2.163,30
3	Kab. Batang	2021	66,52	94,50	176,76	737,69	1.075,47
		2022	51,49	96,51	227,10	737,69	1.112,79
		2023	48,80	38,04	257,71	772,54	1.117,09
		2024	34,46	66,34	255,09	828,44	1.184,33
4	Kab Blora	2021	167,03	163,94	227,28	863,60	1.421,85
		2022	156,38	113,87	291,66	863,60	1.425,51
		2023	296,26	116,01	309,26	906,43	1.627,96
		2024	231,11	131,61	310,93	989,25	1.662,90
5	Kab. Boyolali	2021	56,45	166,77	244,90	944,89	1.413,01
		2022	62,19	175,11	304,28	944,89	1.486,47
		2023	59,45	89,46	317,95	991,44	1.458,30
		2024	45,93	43,78	302,47	1.010,58	1.402,76
6	Kab. Brebes	2021	48,59	136,10	307,09	1.238,59	1.730,37
		2022	47,41	119,27	466,14	1.239,37	1.872,19
		2023	42,96	108,57	506,50	1.331,82	1.989,85
		2024	33,82	204,79	509,77	1.455,09	2.203,47
7	Kab. Cilacap	2021	76,75	112,70	342,26	1.272,87	1.804,58
		2022	79,00	122,80	504,40	1.274,34	1.980,54
		2023	62,49	120,99	554,17	1.341,03	2.078,68
		2024	55,85	160,55	590,74	1.439,40	2.246,54
8	Kab. Demak	2021	53,96	104,01	222,74	856,41	1.237,12
		2022	64,81	77,96	326,84	856,67	1.326,28
		2023	71,25	67,80	345,15	872,51	1.356,71
		2024	59,06	166,95	370,80	933,33	1.530,14
9	Kab. Grobogan	2021	65,89	139,47	275,65	1.034,22	1.515,23
		2022	73,31	109,59	401,06	1.034,22	1.618,18
		2023	61,96	92,50	417,88	1.083,35	1.655,69
		2024	53,46	106,12	426,09	1.207,58	1.793,25
10	Kab. Jepara	2021	66,54	149,57	225,51	928,87	1.370,49
		2022	61,42	106,85	319,84	928,87	1.416,98
		2023	59,54	88,14	340,60	964,60	1.452,88
		2024	43,63	64,64	349,46	1.050,66	1.508,39
11	Kab. Karanganyar	2021	52,24	58,93	258,64	903,63	1.273,44
		2022	54,37	100,99	307,33	903,63	1.366,32
		2023	54,61	104,07	338,28	935,26	1.432,22
		2024	41,66	202,55	323,10	985,90	1.553,21
12	Kab. Kebumen	2021	42,93	78,33	325,47	1.179,29	1.626,02
		2022	43,28	70,28	436,52	1.179,29	1.729,37
		2023	38,16	49,51	460,90	1.240,10	1.788,67
		2024	30,01	68,39	456,71	1.266,37	1.821,48
13	Kab. Kendal	2021	61,46	95,65	244,46	901,55	1.303,12
		2022	59,19	96,94	331,50	901,81	1.389,44
		2023	58,14	92,70	358,11	946,78	1.455,73
		2024	50,56	74,93	359,86	1.008,83	1.494,18
14	Kab. Klaten	2021	53,10	60,73	283,53	1.149,42	1.546,78
		2022	54,77	63,68	358,86	1.149,42	1.626,73
		2023	52,36	63,09	386,85	1.209,48	1.711,78
		2024	44,15	46,60	373,81	1.226,57	1.691,13

NO	NAMA DAERAH	PERIODE	DANA PERIMBANGAN				JUMLAH DP
			DBH	DAK		DAU	
				FISIK	NON FISIK		
15	Kab. Kudus	2021	275,52	45,27	190,02	747,50	1.258,31
		2022	313,04	77,12	225,75	747,50	1.363,41
		2023	342,88	62,20	251,63	784,04	1.440,75
		2024	285,81	18,26	228,59	812,67	1.345,33
16	Kab. Magelang	2021	47,51	130,81	241,26	975,02	1.394,60
		2022	50,63	142,76	335,09	975,30	1.503,78
		2023	44,98	102,75	359,10	1.022,71	1.529,54
		2024	38,86	142,71	347,83	1.062,46	1.591,86
17	Kab. Pati	2021	52,76	94,94	277,32	1.107,12	1.532,14
		2022	51,66	86,00	361,36	1.107,12	1.606,14
		2023	46,29	90,26	386,41	1.161,83	1.684,79
		2024	35,44	131,78	381,30	1.207,92	1.756,44
18	Kab Pekalongan	2021	38,74	83,66	225,89	871,07	1.219,36
		2022	38,00	78,24	290,75	871,11	1.278,10
		2023	29,88	110,61	305,03	913,29	1.358,81
		2024	26,70	175,12	302,25	941,92	1.445,99
19	Kab. Pemalang	2021	45,41	122,62	281,96	1.107,79	1.557,78
		2022	43,52	54,18	430,95	1.107,79	1.636,44
		2023	34,17	91,39	451,37	1.178,38	1.755,31
		2024	30,72	102,18	457,47	1.227,72	1.818,09
20	Kab. Purbalingga	2021	36,30	103,64	217,62	830,05	1.187,61
		2022	37,58	151,07	304,75	830,53	1.323,93
		2023	34,49	70,07	331,45	874,09	1.310,10
		2024	28,42	72,67	328,60	889,57	1.319,26
21	Kab. Purworejo	2021	37,49	108,21	216,46	913,94	1.276,10
		2022	36,73	103,93	282,02	913,94	1.336,62
		2023	32,98	48,95	286,56	957,94	1.326,43
		2024	26,73	86,12	281,97	1.004,08	1.398,90
22	Kab. Rembang	2021	68,31	79,80	172,28	718,20	1.038,59
		2022	77,62	97,98	212,11	718,20	1.105,91
		2023	70,38	122,52	232,26	748,50	1.173,66
		2024	62,24	96,27	217,02	805,46	1.180,99
23	Kab. Semarang	2021	57,21	92,05	226,37	897,10	1.272,73
		2022	53,64	133,31	325,28	897,10	1.409,33
		2023	48,09	91,25	340,39	941,48	1.421,21
		2024	42,46	105,29	335,41	974,00	1.457,16
24	Kab. Sragen	2021	39,19	80,33	231,07	984,48	1.335,07
		2022	40,10	99,61	304,70	984,48	1.428,89
		2023	35,01	54,72	335,67	1.031,71	1.457,11
		2024	26,70	72,44	315,05	1.066,36	1.480,55
25	Kab. Sukoharjo	2021	49,56	53,00	212,01	847,88	1.162,45
		2022	49,36	47,31	258,61	847,88	1.203,16
		2023	45,20	37,79	276,02	889,84	1.248,85
		2024	34,96	41,11	264,76	909,29	1.250,12
26	Kab. Tegal	2021	43,45	125,81	292,50	1.077,04	1.538,80
		2022	44,64	90,82	426,39	1.077,04	1.638,89
		2023	41,57	74,47	459,09	1.146,42	1.721,55
		2024	33,49	80,00	441,72	1.203,00	1.758,21
27	Kab. Temanggung	2021	66,99	131,53	182,44	753,14	1.134,10
		2022	75,66	141,12	249,23	753,17	1.219,18
		2023	75,60	109,54	277,50	791,52	1.254,16
		2024	64,27	67,59	268,22	820,33	1.220,41
28	Kab. Wonogiri	2021	43,10	108,14	284,88	1.059,94	1.496,06
		2022	47,86	98,18	355,40	1.059,94	1.561,38
		2023	46,68	143,77	393,91	1.114,87	1.699,23
		2024	37,74	73,48	387,56	1.133,37	1.632,15

NO	NAMA DAERAH	PERIODE	DANA PERIMBANGAN				JUMLAH DP
			DBH	DAK		DAU	
				FISIK	NON FISIK		
29	Kab. Wonosobo	2021	47,91	100,30	218,57	792,38	1.159,16
		2022	48,43	67,94	281,72	792,38	1.190,47
		2023	38,89	161,08	312,82	832,23	1.345,02
		2024	33,37	126,12	289,78	854,88	1.304,15
30	Kota Magelang	2021	35,03	39,20	49,04	409,63	532,90
		2022	36,03	25,17	63,77	409,63	534,60
		2023	34,05	35,80	70,70	430,70	571,25
		2024	26,68	42,31	70,75	453,24	592,98
31	Kota Pekalongan	2021	35,49	52,97	76,19	426,40	591,05
		2022	37,78	60,11	98,52	426,40	622,81
		2023	34,81	52,41	111,74	451,20	650,16
		2024	28,03	34,00	99,97	468,98	630,98
32	Kota Salatiga	2021	35,44	28,36	56,19	418,01	538,00
		2022	36,06	26,22	76,37	418,01	556,66
		2023	32,86	23,29	83,29	440,85	580,29
		2024	25,85	33,11	83,42	460,48	602,86
33	Kota Semarang	2021	222,12	87,40	240,38	1.167,62	1.717,52
		2022	211,12	50,56	399,62	1.167,62	1.828,92
		2023	215,08	66,33	435,08	1.208,49	1.924,98
		2024	184,59	14,63	438,54	1.277,40	1.915,16
34	Kota Surakarta	2021	69,57	77,62	144,50	781,83	1.073,52
		2022	63,26	114,73	213,69	781,83	1.173,51
		2023	68,00	16,41	214,74	809,19	1.108,34
		2024	48,75	61,87	212,51	855,44	1.178,57
35	Kota Tegal	2021	37,37	37,55	74,08	451,70	600,70
		2022	37,89	42,38	95,61	451,70	627,58
		2023	34,97	22,62	109,11	473,32	640,02
		2024	27,38	15,64	110,29	494,94	648,25

Lampiran 4. Data Penelitian Tahun 2021-2024

Dalam Jutaan Rupiah

NO	NAMA DAERAH	PERIODE	BM	PAD	DP	KKPD
			X1	X2	X3	Y
1	Kab. Banjarnegara	2021	294,84	313,83	1.263,40	15,04
		2022	191,79	284,50	1.325,95	13,92
		2023	238,34	335,50	1.358,66	15,57
		2024	235,21	385,23	1.410,84	16,46
2	Kab. Banyumas	2021	432,23	762,00	1.913,35	21,85
		2022	479,04	822,68	1.978,91	24,01
		2023	333,50	854,94	2.039,39	24,44
		2024	436,94	903,57	2.163,30	23,82
3	Kab. Batang	2021	196,08	322,78	1.075,47	17,72
		2022	183,19	300,96	1.112,79	17,19
		2023	139,57	327,78	1.117,09	18,13
		2024	175,11	292,09	1.184,33	14,96
4	Kab Blora	2021	298,44	326,77	1.421,85	14,67
		2022	507,66	325,96	1.425,51	14,97
		2023	362,50	359,48	1.627,96	14,83
		2024	298,67	428,66	1.662,90	16,39
5	Kab. Boyolali	2021	443,84	514,97	1.413,01	21,19
		2022	567,08	444,69	1.486,47	18,74
		2023	453,92	494,47	1.458,30	20,23
		2024	288,53	538,70	1.402,76	21,94
6	Kab. Brebes	2021	439,32	518,51	1.730,37	16,40
		2022	480,67	419,39	1.872,19	14,03
		2023	357,92	479,93	1.989,85	15,61
		2024	474,55	613,89	2.203,47	17,39
7	Kab. Cilacap	2021	583,81	739,13	1.804,58	22,17
		2022	537,11	700,42	1.980,54	21,27
		2023	468,85	768,64	2.078,68	22,11
		2024	423,25	885,06	2.246,54	23,03
8	Kab. Demak	2021	279,92	445,00	1.237,12	18,81
		2022	344,30	477,19	1.326,28	19,86
		2023	272,53	508,05	1.356,71	21,02
		2024	279,19	594,88	1.530,14	22,00
9	Kab. Grobogan	2021	290,18	424,18	1.515,23	16,10
		2022	462,22	424,75	1.618,18	16,41
		2023	363,90	432,85	1.655,69	16,21
		2024	332,47	519,14	1.793,25	17,59
10	Kab. Jepara	2021	231,97	408,63	1.370,49	17,16
		2022	196,29	427,51	1.416,98	18,37
		2023	210,16	446,09	1.452,88	19,04
		2024	187,18	497,78	1.508,39	19,52
11	Kab. Karanganyar	2021	193,82	426,65	1.273,44	19,70
		2022	253,01	511,73	1.366,32	22,73
		2023	253,72	441,86	1.432,22	19,59
		2024	333,81	453,87	1.553,21	18,01
12	Kab. Kebumen	2021	266,11	472,00	1.626,02	16,67
		2022	272,30	512,34	1.729,37	17,99
		2023	278,84	463,65	1.788,67	15,98
		2024	278,74	484,29	1.821,48	15,43
13	Kab. Kendal	2021	141,15	439,20	1.303,12	19,09
		2022	338,36	437,90	1.389,44	19,33
		2023	305,97	543,91	1.455,73	22,17
		2024	212,88	517,11	1.494,18	20,54
14	Kab. Klaten	2021	189,60	315,30	1.546,78	12,27
		2022	246,67	358,05	1.626,73	13,84
		2023	295,60	339,09	1.711,78	12,69
		2024	273,58	372,12	1.691,13	13,43

NO	NAMA DAERAH	PERIODE	BM	PAD	DP	KKPD
			X1	X2	X3	Y
15	Kab. Kudus	2021	155,22	507,16	1.258,31	23,44
		2022	379,32	418,70	1.363,41	20,14
		2023	418,86	502,36	1.440,75	22,07
		2024	310,21	511,08	1.345,33	23,69
16	Kab. Magelang	2021	251,16	375,37	1.394,60	15,20
		2022	304,00	432,68	1.503,78	16,91
		2023	318,00	465,48	1.529,54	18,09
		2024	300,09	520,85	1.591,86	18,73
17	Kab. Pati	2021	271,12	388,64	1.532,14	14,26
		2022	240,76	388,75	1.606,14	14,37
		2023	212,13	441,00	1.684,79	15,99
		2024	269,32	482,69	1.756,44	16,40
18	Kab Pekalongan	2021	208,04	346,60	1.219,36	16,68
		2022	261,15	305,31	1.278,10	14,72
		2023	266,77	342,12	1.358,81	15,55
		2024	331,96	430,12	1.445,99	18,16
19	Kab. Pemalang	2021	180,04	365,40	1.557,78	14,03
		2022	150,61	321,26	1.636,44	12,88
		2023	217,20	312,12	1.755,31	12,13
		2024	136,88	365,86	1.818,09	13,28
20	Kab. Purbalingga	2021	196,96	377,88	1.187,61	18,39
		2022	239,86	306,19	1.323,93	15,14
		2023	139,11	341,09	1.310,10	16,50
		2024	97,88	258,55	1.319,26	12,87
21	Kab. Purworejo	2021	266,46	438,26	1.276,10	19,14
		2022	419,62	330,27	1.336,62	15,11
		2023	263,30	379,93	1.326,43	16,84
		2024	195,73	448,72	1.398,90	16,91
22	Kab. Rembang	2021	187,28	404,10	1.038,59	21,14
		2022	280,27	353,09	1.105,91	19,17
		2023	306,99	342,02	1.173,66	18,05
		2024	158,81	173,98	1.180,99	19,34
23	Kab. Semarang	2021	292,00	575,75	1.272,73	23,82
		2022	368,03	480,30	1.409,33	20,55
		2023	255,14	530,15	1.421,21	22,15
		2024	254,62	597,79	1.457,16	23,29
24	Kab. Sragen	2021	211,72	537,26	1.335,07	22,99
		2022	351,88	364,48	1.428,89	16,74
		2023	433,41	406,00	1.457,11	17,63
		2024	240,53	468,24	1.480,55	19,24
25	Kab. Sukoharjo	2021	283,87	528,35	1.162,45	24,93
		2022	220,46	495,28	1.203,16	24,58
		2023	292,71	537,10	1.248,85	24,86
		2024	234,71	553,60	1.250,12	24,70
26	Kab. Tegal	2021	368,87	591,00	1.538,80	20,65
		2022	313,68	531,15	1.638,89	19,36
		2023	358,32	553,33	1.721,55	19,67
		2024	339,16	612,18	1.758,21	20,65
27	Kab. Temanggung	2021	235,99	363,12	1.134,10	18,42
		2022	247,09	308,70	1.219,18	16,29
		2023	174,71	350,28	1.254,16	17,48
		2024	164,56	388,86	1.220,41	18,50
28	Kab. Wonogiri	2021	364,22	241,30	1.496,06	10,48
		2022	301,73	332,81	1.561,38	14,71
		2023	372,94	287,87	1.699,23	11,48
		2024	203,28	306,54	1.632,15	12,39

NO	NAMA DAERAH	PERIODE	BM	PAD	DP	KKPD
			X1	X2	X3	Y
29	Kab. Wonosobo	2021	256,22	339,74	1.159,16	17,27
		2022	363,43	264,94	1.190,47	13,79
		2023	329,90	267,06	1.345,02	12,98
		2024	237,32	307,37	1.304,15	14,60
30	Kota Magelang	2021	186,00	319,39	532,90	32,12
		2022	154,81	377,36	534,60	38,28
		2023	151,57	324,67	571,25	32,06
		2024	166,12	349,05	592,98	34,48
31	Kota Pekalongan	2021	160,51	252,00	591,05	26,08
		2022	196,56	263,47	622,81	26,64
		2023	170,65	263,35	650,16	25,61
		2024	119,32	271,12	630,98	26,68
32	Kota Salatiga	2021	130,27	280,68	538,00	29,66
		2022	75,19	240,95	556,66	26,24
		2023	91,95	284,53	580,29	28,82
		2024	105,44	313,97	602,86	30,24
33	Kota Semarang	2021	953,67	2.385,94	1.717,52	49,47
		2022	1.048,84	2.545,99	1.828,92	51,23
		2023	1.089,35	2.835,15	1.924,98	52,97
		2024	1.103,98	2.885,77	1.915,16	52,78
34	Kota Surakarta	2021	341,10	560,58	1.073,52	28,91
		2022	380,83	647,44	1.173,51	31,92
		2023	380,39	687,32	1.108,34	34,55
		2024	213,64	559,35	1.178,57	42,05
35	Kota Tegal	2021	146,32	308,11	600,70	29,89
		2022	144,27	340,05	627,58	32,62
		2023	90,73	336,84	640,02	32,01
		2024	82,07	378,52	648,25	33,71

Lampiran 5. Data Outlier

NO	NAMA DAERAH	PERIODE	BM X1	PAD X2	DP X3	KKPD Y
1	Kota Semarang	2021	953,67	2.385,94	1.717,52	49,47
2		2022	1.048,8 4	2.545,99	1.828,92	51,23
3		2023	1.089,3 5	2.835,15	1.924,98	52,97
4		2024	1.103,9 8	2.885,77	1.915,16	52,78
5	Kota Surakarta	2024	213,64	559,35	1.178,57	42,05
6	Kota Magelang	2022	154,81	377,36	534,60	38,28

Lampiran 6. Data Penelitian Setelah Outlier Tahun 2021-2024

NO	NAMA DAERAH	PERIODE	BM X1	PAD X2	DP X3	KKPD Y
1	Kab. Banjarnegara	2021	294,84	313,83	1.263,40	15,04
2		2022	191,79	284,50	1.325,95	13,92
3		2023	238,34	335,50	1.358,66	15,57
4		2024	235,21	385,23	1.410,84	16,46
5	Kab. Banyumas	2021	432,23	762,00	1.913,35	21,85
6		2022	479,04	822,68	1.978,91	24,01
7		2023	333,50	854,94	2.039,39	24,44
8		2024	436,94	903,57	2.163,30	23,82
9	Kab. Batang	2021	196,08	322,78	1.075,47	17,72
10		2022	183,19	300,96	1.112,79	17,19
11		2023	139,57	327,78	1.117,09	18,13
12		2024	175,11	292,09	1.184,33	14,96
13	Kab Blora	2021	298,44	326,77	1.421,85	14,67
14		2022	507,66	325,96	1.425,51	14,97
15		2023	362,50	359,48	1.627,96	14,83
16		2024	298,67	428,66	1.662,90	16,39
17	Kab. Boyolali	2021	443,84	514,97	1.413,01	21,19
18		2022	567,08	444,69	1.486,47	18,74
19		2023	453,92	494,47	1.458,30	20,23
20		2024	288,53	538,70	1.402,76	21,94
21	Kab. Brebes	2021	439,32	518,51	1.730,37	16,40
22		2022	480,67	419,39	1.872,19	14,03
23		2023	357,92	479,93	1.989,85	15,61
24		2024	474,55	613,89	2.203,47	17,39
25	Kab. Cilacap	2021	583,81	739,13	1.804,58	22,17
26		2022	537,11	700,42	1.980,54	21,27
27		2023	468,85	768,64	2.078,68	22,11
28		2024	423,25	885,06	2.246,54	23,03
29	Kab. Demak	2021	279,92	445,00	1.237,12	18,81
30		2022	344,30	477,19	1.326,28	19,86
31		2023	272,53	508,05	1.356,71	21,02
32		2024	279,19	594,88	1.530,14	22,00
33	Kab. Grobogan	2021	290,18	424,18	1.515,23	16,10
34		2022	462,22	424,75	1.618,18	16,41
35		2023	363,90	432,85	1.655,69	16,21
36		2024	332,47	519,14	1.793,25	17,59
37	Kab. Jepara	2021	231,97	408,63	1.370,49	17,16
38		2022	196,29	427,51	1.416,98	18,37
39		2023	210,16	446,09	1.452,88	19,04
40		2024	187,18	497,78	1.508,39	19,52

NO	NAMA DAERAH	PERIODE	BM X1	PAD X2	DP X3	KKPD Y
41	Kab. Karanganyar	2021	193,82	426,65	1.273,44	19,70
42		2022	253,01	511,73	1.366,32	22,73
43		2023	253,72	441,86	1.432,22	19,59
44		2024	333,81	453,87	1.553,21	18,01
45	Kab. Kebumen	2021	266,11	472,00	1.626,02	16,67
46		2022	272,30	512,34	1.729,37	17,99
47		2023	278,84	463,65	1.788,67	15,98
48		2024	278,74	484,29	1.821,48	15,43
49	Kab. Kendal	2021	141,15	439,20	1.303,12	19,09
50		2022	338,36	437,90	1.389,44	19,33
51		2023	305,97	543,91	1.455,73	22,17
52		2024	212,88	517,11	1.494,18	20,54
53	Kab. Klaten	2021	189,60	315,30	1.546,78	12,27
54		2022	246,67	358,05	1.626,73	13,84
55		2023	295,60	339,09	1.711,78	12,69
56		2024	273,58	372,12	1.691,13	13,43
57	Kab. Kudus	2021	155,22	507,16	1.258,31	23,44
58		2022	379,32	418,70	1.363,41	20,14
59		2023	418,86	502,36	1.440,75	22,07
60		2024	310,21	511,08	1.345,33	23,69
61	Kab. Magelang	2021	251,16	375,37	1.394,60	15,20
62		2022	304,00	432,68	1.503,78	16,91
63		2023	318,00	465,48	1.529,54	18,09
64		2024	300,09	520,85	1.591,86	18,73
65	Kab. Pati	2021	271,12	388,64	1.532,14	14,26
66		2022	240,76	388,75	1.606,14	14,37
67		2023	212,13	441,00	1.684,79	15,99
68		2024	269,32	482,69	1.756,44	16,40
69	Kab Pekalongan	2021	208,04	346,60	1.219,36	16,68
70		2022	261,15	305,31	1.278,10	14,72
71		2023	266,77	342,12	1.358,81	15,55
72		2024	331,96	430,12	1.445,99	18,16
73	Kab. Pemalang	2021	180,04	365,40	1.557,78	14,03
74		2022	150,61	321,26	1.636,44	12,88
75		2023	217,20	312,12	1.755,31	12,13
76		2024	136,88	365,86	1.818,09	13,28
77	Kab. Purbalingga	2021	196,96	377,88	1.187,61	18,39
78		2022	239,86	306,19	1.323,93	15,14
79		2023	139,11	341,09	1.310,10	16,50
80		2024	97,88	258,55	1.319,26	12,87

NO	NAMA DAERAH	PERIODE	BM X1	PAD X2	DP X3	KKPD Y
81	Kab. Purworejo	2021	266,46	438,26	1.276,10	19,14
82		2022	419,62	330,27	1.336,62	15,11
83		2023	263,30	379,93	1.326,43	16,84
84		2024	195,73	448,72	1.398,90	16,91
85	Kab. Rembang	2021	187,28	404,10	1.038,59	21,14
86		2022	280,27	353,09	1.105,91	19,17
87		2023	306,99	342,02	1.173,66	18,05
88		2024	158,81	173,98	1.180,99	19,34
89	Kab. Semarang	2021	292,00	575,75	1.272,73	23,82
90		2022	368,03	480,30	1.409,33	20,55
91		2023	255,14	530,15	1.421,21	22,15
92		2024	254,62	597,79	1.457,16	23,29
93	Kab. Sragen	2021	211,72	537,26	1.335,07	22,99
94		2022	351,88	364,48	1.428,89	16,74
95		2023	433,41	406,00	1.457,11	17,63
96		2024	240,53	468,24	1.480,55	19,24
97	Kab. Sukoharjo	2021	283,87	528,35	1.162,45	24,93
98		2022	220,46	495,28	1.203,16	24,58
99		2023	292,71	537,10	1.248,85	24,86
100		2024	234,71	553,60	1.250,12	24,70
101	Kab. Tegal	2021	368,87	591,00	1.538,80	20,65
102		2022	313,68	531,15	1.638,89	19,36
103		2023	358,32	553,33	1.721,55	19,67
104		2024	339,16	612,18	1.758,21	20,65
105	Kab. Temanggung	2021	235,99	363,12	1.134,10	18,42
106		2022	247,09	308,70	1.219,18	16,29
107		2023	174,71	350,28	1.254,16	17,48
108		2024	164,56	388,86	1.220,41	18,50
109	Kab. Wonogiri	2021	364,22	241,30	1.496,06	10,48
110		2022	301,73	332,81	1.561,38	14,71
111		2023	372,94	287,87	1.699,23	11,48
112		2024	203,28	306,54	1.632,15	12,39
113	Kab. Wonosobo	2021	256,22	339,74	1.159,16	17,27
114		2022	363,43	264,94	1.190,47	13,79
115		2023	329,90	267,06	1.345,02	12,98
116		2024	237,32	307,37	1.304,15	14,60
117	Kota Magelang	2021	186,00	319,39	532,90	32,12
118		2023	151,57	324,67	571,25	32,06
119		2024	166,12	349,05	592,98	34,48
120	Kota Pekalongan	2021	160,51	252,00	591,05	26,08
121		2022	196,56	263,47	622,81	26,64

NO	NAMA DAERAH	PERIODE	BM X1	PAD X2	DP X3	KKPD Y
122		2023	170,65	263,35	650,16	25,61
123		2024	119,32	271,12	630,98	26,68
124	Kota Salatiga	2021	130,27	280,68	538,00	29,66
125		2022	75,19	240,95	556,66	26,24
126		2023	91,95	284,53	580,29	28,82
127		2024	105,44	313,97	602,86	30,24
128	Kota Surakarta	2021	341,10	560,58	1.073,52	28,91
129		2022	380,83	647,44	1.173,51	31,92
130		2023	380,39	687,32	1.108,34	34,55
131	Kota Tegal	2021	146,32	308,11	600,70	29,89
132		2022	144,27	340,05	627,58	32,62
133		2023	90,73	336,84	640,02	32,01
134		2024	82,07	378,52	648,25	33,71

Lampiran 7. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	134	75.19	583.81	276.3531	106.55303
PAD	134	173.98	903.57	433.4319	137.47917
DP	134	532.90	2246.54	1378.6261	369.67713
KKPD	134	10.48	34.55	19.6371	5.34364
Valid N (listwise)	134				

Lampiran 8. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		134
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.83921485
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.066
	Negative	-.045
Test Statistic		.066
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.157
	99% Confidence Interval	Lower Bound
		Upper Bound
		.148
		.167

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Lampiran 9. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	BM	.549	1.823
	PAD	.597	1.676
	DP	.531	1.883

a. Dependent Variable: KKPD

Lampiran 10. Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.783	.381		7.298	<.001
	BM	-.001	.001	-.093	-.825	.411
	PAD	-.001	.001	-.126	-1.170	.244
	DP	.000	.000	-.146	-1.277	.204

a. Dependent Variable: ABS

Lampiran 11. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.898 ^a	.806	.802	1.59646	1.945

a. Predictors: (Constant), DP2, BM2, PAD2

b. Dependent Variable: KKPD2

Lampiran 12. Hasil Uji Model Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.001	.414		29.018	<,001
	BM2	-.002	.002	-.044	-.966	.336
	PAD2	.032	.002	.943	20.044	<,001
	DP2	-.013	.001	-.917	-18.419	<,001

a. Dependent Variable: KKPD2

Lampiran 13. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1357.637	3	452.546	177.560	<,001 ^b
	Residual	326.233	128	2.549		
	Total	1683.869	131			

a. Dependent Variable: KKPD2

b. Predictors: (Constant), DP2, BM2, PAD2

Lampiran 14. Hasil Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.001	.414		29.018	<,.001
	BM2	-.002	.002	-.044	-.966	.336
	PAD2	.032	.002	.943	20.044	<,.001
	DP2	-.013	.001	-.917	-18.419	<,.001

a. Dependent Variable: KKPD2

Lampiran 15. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.898 ^a	.806	.802	1.59646	1.945

a. Predictors: (Constant), DP2, BM2, PAD2

b. Dependent Variable: KKPD2

